

**ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PENGUATAN
KEWENANGAN LEMBAGA KOMISI YUDISIAL KEPADA
PELANGGAR KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM MENURUT
UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI
YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

Skripsi

Oleh:

M.YUSRO AMRONI

NIM. C95216131



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Yusro Amroni

NIM : C95216131

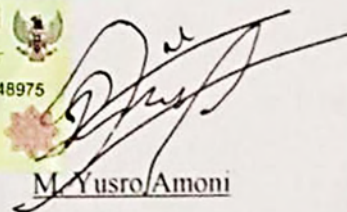
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam /
Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis Fikih Siyasah Terhadap Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Kepada Pelanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



M. Yusro Amroni

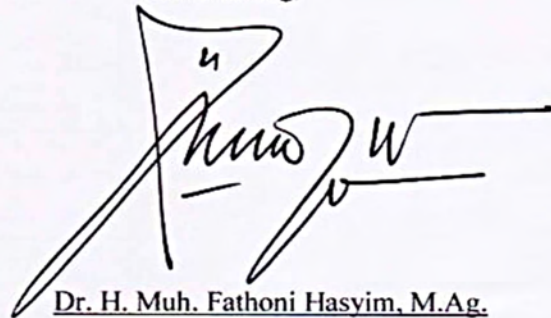
NIM. C95216131

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Yusro Amroni NIM C95216131 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 03 Januari 2021

Pembimbing,



Dr. H. Muh. Fathoni Hasvim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M Yusro Amroni NIM. C952161 31 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari Jum'at, 15 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


Prof. Dr. Moh Eathoni Hasyim, M.Ag.

NIP. 195601101987031001

Penguji III,


Dr. Nurul Asiyah Nadhifu, M.HI.

NIP. 197504132003122001

Penguji II,


Syamsuri, M.HI.

NIP. 197210292150110104

Penguji IV,


Moh Faizur Rohman, M.HI.

NIP. 198911262019031010

Surabaya, 15 Januari 2021

Mengesahkan.

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Au.

NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Yusro Amroni
NIM : C95216131
Fakultas/Jurusan : Hukum dan Syariah / Hukum Tata Negara
E-mail address : yusroamroni05@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (... ..)

yang berjudul :

Analisis Fikih Aiyasah Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Kepada Pelanggar Kode Etik Dan Perilaku Hakim Menurut UU No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juli 2021

Penulis

(M. Yusro Amroni)

dan badan peradilan yang ada dibawahnya, masih bersifat eksternal. Dan jika ada pelanggaran-pelanggaran terkait Kode Etik Perilaku Hakim maka, Komisi Yudisial hanya bersifat sebagai penghubung saja, tidak ada kewenangan untuk memutuskan.

Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Komisi Yudisial menegaskan bahwasannya tugas dari lembaga ini adalah menjaga harkat dan martabat hakim dari berbagai bentuk yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat dari hakim. Baik hakim yang berada dilingkungan peradilan Mahkamah Agung maupun yang di bawahnya. Menjaga harkat dan martabat dari seorang hakim berimplikasi pada penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim, hakim pada saat melaksanakan suatu tugasnya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang ada haruslah memuat sepuluh prinsip yang ada di Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Sebab, jika hakim tidak berpedoman pada ketentuan tersebut, maka hakim pun tidak mempunyai garis-garis haluan dalam melaksanakan suatu kewenangannya.

Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim berpedoman pada Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPPH) yang dirumuskan dengan Mahkamah Agung. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tertanggal 8 April 2009. Dalam perumusan Surat Keputusan Bersama tersebut menuai perjalanan pro dan kontra, sehingga menghasilkan produk hukum kesepakatan yang menjadi acuan pada diri hakim, khususnya dalam kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia.

